



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan Romawi V Perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Gubernur melakukan penyesuaian APBD sehingga menetapkan Perubahan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;

1334 2017 KALIMANTAN UTARA

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 419.868.015.909,00
-----------	------------------------

2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
------------------------	-----------------

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah Perubahan	Rp. 419.868.015.909,00
--------------------------	------------------------

- b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.800.696.737.000,00
-----------	--------------------------

2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
------------------------	-----------------

Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan	Rp. 1.800.696.737.000,00
-------------------	--------------------------

32 TAHUN 2016 KALIMANTAN UTARA

c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 114.588.229.671,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 114.588.229.671,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.335.152.982.580,00
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 537.505.205.303,80
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 537.505.205.303,80
2) Belanja Bunga	
a) Semula	Rp. 7.150.492.707,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 7.150.492.707,00
3) Belanja Subsidi	
a) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
4) Belanja hibah	
a) Semula	Rp. 228.199.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 29.154.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 199.044.400.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp. 133.939.198.286,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 133.939.198.286,00

7) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp. 188.276.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 188.276.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 1.097.915.296.296,80
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 181.071.803.700,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 181.071.803.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp. 722.838.498.851,60
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 18.856.917.400,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 741.695.416.251,60
3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 951.352.690.355,28
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 10.297.682.600,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 961.650.372.955,2
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	<u>Rp.1.884.417.592.906,88</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/Defisit	<u>Rp.2.982.332.889.203,68</u>
	Rp. (647.179.906.623,68)
c. Pembiayaan :	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp. 647.179.906.623,68
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 647.179.906.623,68

## 2) Pengeluaran

a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>647.179.906.623,68</u>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Netto Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A sebagaimana tercantum pada lampiran I dan I.a Peraturan Gubernur ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A adalah memuat perubahan anggaran, penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Bidang Energi Skala Kecil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang turun setelah APBD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.a Peraturan Gubernur ini.



Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor




pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017  
NOMOR 34

No	N A M A	JABATAN	PARAF
1	DRS. ZAINUDDIN HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	DJOKO ISWORD, S.H., M.H	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	DRS. PURNOMO, MM	Pt. Kepala BPKAD	



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan Romawi V Perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Gubernur melakukan penyesuaian APBD sehingga menetapkan Perubahan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;

KALIMANTAN UTARA

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
 

1) Semula	Rp. 419.868.015.909,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 419.868.015.909,00
  - b. Dana Perimbangan
 

1) Semula	Rp. 1.800.696.737.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.800.696.737.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 114.588.229.671,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 114.588.229.671,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.335.152.982.580,00
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 537.505.205.303,80
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 537.505.205.303,80
2) Belanja Bunga	
a) Semula	Rp. 7.150.492.707,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 7.150.492.707,00
3) Belanja Subsidi	
a) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
4) Belanja hibah	
a) Semula	Rp. 228.199.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 29.154.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 199.044.400.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp. 133.939.198.286,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 133.939.198.286,00

7) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp. 188.276.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 188.276.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 1.097.915.296.296,80
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 181.071.803.700,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 181.071.803.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp. 722.838.498.851,60
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 18.856.917.400,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 741.695.416.251,60
3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 951.352.690.355,28
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 10.297.682.600,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 961.650.372.955,2
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	<u>Rp.1.884.417.592.906,88</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/Defisit	<u>Rp.2.982.332.889.203,68</u>
	Rp. (647.179.906.623,68)
c. Pembiayaan :	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp. 647.179.906.623,68
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 647.179.906.623,68



2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>647.179.906.623,68</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	0,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A sebagaimana tercantum pada lampiran I dan I.a Peraturan Gubernur ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A adalah memuat perubahan anggaran, penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Bidang Energi Skala Kecil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang turun setelah APBD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.a Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Mei 2017

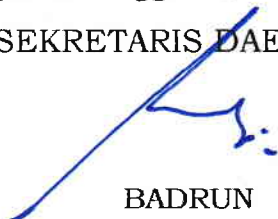
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017  
NOMOR 34

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2017



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.335.152.982.580,00	2.335.152.982.580,00	0,00	0,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	419.868.015.909,00	419.868.015.909,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	293.334.558.388,00	293.334.558.388,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.393.457.521,00	126.393.457.521,00	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.800.696.737.000,00	1.800.696.737.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	329.295.149.000,00	329.295.149.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	308.016.815.000,00	308.016.815.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	114.588.229.671,00	114.588.229.671,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	969.480.000,00	969.480.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	2.982.332.889.203,68	2.982.332.889.203,68	0,00	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.127.069.896.296,80	1.097.915.296.296,80	(29.154.600.000,00)	(2,59)
2.1.1	Belanja Pegawai	537.505.205.303,80	537.505.205.303,80	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	228.199.000.000,00	199.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(12,78)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	188.276.000.000,00	188.276.000.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.855.262.992.906,88	1.884.417.592.906,88	29.154.600.000,00	1,57
2.2.1	Belanja Pegawai	181.071.803.700,00	181.071.803.700,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	722.838.498.851,60	741.695.416.251,60	18.856.917.400,00	2,61
2.2.3	Belanja Modal	951.352.690.355,28	961.650.372.955,28	10.297.682.600,00	1,08
		10			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1					
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(647.179.906.623,68)	(647.179.906.623,68)	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>		0,00	0,00	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS. ZAINUDDIN HZ, M.S	Asisten Administrasi Umum	
2	DROKO ISAZARD, S.H. M.H	Pte. Kepala Biro Hukum	
3	DRS. PURNOMO, MM	Pte. Kepala BKKAD	



## RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN Ia  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	2.335.152.982.580,00	2.335.152.982.580,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	419.868.015.909,00	419.868.015.909,00	0,00	0,00	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	293.334.558.388,00	293.334.558.388,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	65.159.038.013,00	65.159.038.013,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	17.893.723.751,00	17.893.723.751,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	301.234.006,00	301.234.006,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	177.809.220,00	177.809.220,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	17.181.160.425,00	17.181.160.425,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	602.501.279,00	602.501.279,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor	24.764.893.885,00	24.764.893.885,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.01.11	Pajak Kendaraan Bermotor	287.675.447,00	287.675.447,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.12	G. Kendaraan Berat/ Besar	3.911.000.000,00	3.911.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
4.1.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	81.348.954.375,00	81.348.954.375,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	27.273.942.599,00	27.273.942.599,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	34.238.000,00	34.238.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	306.200.000,00	306.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	17.002.923.685,00	17.002.923.685,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor	35.057.591.225,00	35.057.591.225,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.11	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.858.866,00	17.858.866,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.12	G. Kendaraan Berat/ Besar	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	111.000.000.000,00	111.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05.06	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	111.000.000.000,00	111.000.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
4.1.1.06	Pajak Air Permukaan	658.500.000,00	658.500.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.06.01	Pajak Air Permukaan	658.500.000,00	658.500.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.07	Pajak Rokok	35.168.066.000,00	35.168.066.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.07.01	Pajak Rokok	35.168.066.000,00	35.168.066.000,00	0,00	0,00		
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	126.393.457.521,00	126.393.457.521,00	0,00	0,00		
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	116.668.457.521,00	116.668.457.521,00	0,00	0,00		
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	116.668.457.521,00	116.668.457.521,00	0,00	0,00		
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.800.696.737.000,00	1.800.696.737.000,00	0,00	0,00		
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	329.295.149.000,00	329.295.149.000,00	0,00	0,00		
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	73.360.332.000,00	73.360.332.000,00	0,00	0,00		
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	37.956.122.000,00	37.956.122.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	28.213.668.000,00	28.213.668.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	3.829.149.000,00	3.829.149.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	3.361.393.000,00	3.361.393.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	255.934.817.000,00	255.934.817.000,00	0,00	0,00		
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Turan Hak Penguasaan Hutan	17.622.080.000,00	17.622.080.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	10.625.264.000,00	10.625.264.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	126.560.004.000,00	126.560.004.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Turan Tetap (Land-Rent)	6.080.819.000,00	6.080.819.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	83.645.571.000,00	83.645.571.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	10.271.218.000,00	10.271.218.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.129.861.000,00	1.129.861.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00		
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00		
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	308.016.815.000,00	308.016.815.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	76.116.080.000,00	76.116.080.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	8.360.357.000,00	8.360.357.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	58.280.485.000,00	58.280.485.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	9.475.238.000,00	9.475.238.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fiskal	163.270.194.000,00	163.270.194.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Sekolah	133.463.000.000,00	133.463.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.3.02.03	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.3.02.04	Tunjangan Profesi Guru	24.549.755.000,00	24.549.755.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.02.05	Tambahan Penghasilan Guru	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.02.06	Tunjangan Khusus Guru	36.636.000,00	36.636.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.02.07	Dana Pelayaran Administrasi Kependudukan	1.400.803.000,00	1.400.803.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	68.630.541.000,00	68.630.541.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.03.01	Bidang Pendidikan	27.049.173.000,00	27.049.173.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.03.02	Bidang Jalan	32.089.155.000,00	32.089.155.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.03.03	Bidang Irigasi	5.831.950.000,00	5.831.950.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.03.04	Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00	0,00		
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	114.588.229.671,00	114.588.229.671,00	0,00	0,00		
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	969.480.000,00	969.480.000,00	0,00	0,00		
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00		
4.3.1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00		
4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	674.280.000,00	674.280.000,00	0,00	0,00		
4.3.1.04.03	Sumbangan Pihak Ketiga	674.280.000,00	674.280.000,00	0,00	0,00		
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00		
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6				
1	2							7	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00				
4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00				
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00				
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00				
5	<b>BELANJA</b>	2.982.332.889.203,68	2.982.332.889.203,68	0,00	0,00				
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.127.069.896.296,80	1.097.915.296.296,80	(29.154.600.000,00)	(2,59)				
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	537.505.205.303,80	537.505.205.303,80	0,00	0,00				
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	290.051.036.932,75	290.051.036.932,75	0,00	0,00				
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	184.029.596.566,20	182.809.596.566,20	(1.220.000.000,00)	(0,66)				
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	19.384.001.267,01	19.384.001.267,01	0,00	0,00				
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	18.817.359.716,03	19.037.359.716,03	220.000.000,00	1,17				
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.237.137.340,00	27.237.137.340,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.505.507.119,99	6.505.507.119,99	0,00	0,00				
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	11.663.934.224,58	12.663.934.224,58	1.000.000.000,00	8,57				
5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.307.554.393,00	3.307.554.393,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	113.533.152,19	113.533.152,19	0,00	0,00				
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.342.358.283,75	7.342.358.283,75	0,00	0,00				
5.1.1.01.10	Uang Paket	98.154.000,00	98.154.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	79.448.775,00	79.448.775,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	76.244.625,00	76.244.625,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	62.868.375,00	62.868.375,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	13.643.775,00	13.643.775,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	912.181.325,00	912.181.325,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.22	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.165.913.995,00	1.165.913.995,00	0,00	0,00				
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	228.935.668.371,05	228.935.668.371,05	0,00	0,00				
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	227.153.668.371,05	227.153.668.371,05	0,00	0,00				
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.091.500.000,00	10.091.500.000,00	0,00	0,00				



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.040.500.000,00	9.040.500.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Gubernur / Wakil Gubernur	1.051.000.000,00	1.051.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	8.427.000.000,00	8.427.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	8.427.000.000,00	8.427.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.2	<b>Belanja Bunga</b>	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00				
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00				
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.3.01	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	228.199.000.000,00	199.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(12,78)				
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	138.199.000.000,00	109.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(21,10)				
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD	133.463.000.000,00	68.107.600.000,00	(65.355.400.000,00)	(48,97)				
5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP	0,00	31.032.000.000,00	31.032.000.000,00	0,00				
5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA	0,00	3.731.000.000,00	3.731.000.000,00	0,00				
5.1.4.07.04	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK	0,00	1.437.800.000,00	1.437.800.000,00	0,00				
5.1.4.07.05	Belanja Hibah Dana BOS ke Sekolah Swasta	4.736.000.000,00	4.736.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00				
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00				
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00				
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	188.276.000.000,00	188.276.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	188.276.000.000,00	188.276.000.000,00	0,00	0,00				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan	28.649.000.000,00	28.649.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tarakan	50.412.000.000,00	50.412.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Nunukan	62.153.000.000,00	62.153.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Malinau	23.438.000.000,00	23.438.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tana Tidung	21.124.000.000,00	21.124.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.855.262.992.906,88	1.884.417.592.906,88	29.154.600.000,00	1,57				
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	181.071.803.700,00	181.071.803.700,00	0,00	0,00				
5.2.1.01	Honorarium PNS	92.984.391.700,00	93.044.391.700,00	60.000.000,00	0,06				
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.417.330.000,00	78.408.930.000,00	(8.400.000,00)	(0,01)				
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang Dan Jasa	4.580.975.100,00	4.664.975.100,00	84.000.000,00	1,83				
5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.400.000,00	327.400.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.253.395.000,00	7.259.395.000,00	6.000.000,00	0,08				
5.2.1.01.05	Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan	2.324.791.600,00	2.303.191.600,00	(21.600.000,00)	(0,93)				
5.2.1.01.06	Honorarium Verifikasi Dana Hibah dan Bansos	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68.447.602.000,00	71.385.432.000,00	2.937.830.000,00	4,29				
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	995.000.000,00	995.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	67.452.602.000,00	70.390.432.000,00	2.937.830.000,00	4,36				
5.2.1.03	Uang Lembur	161.280.000,00	161.280.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	161.280.000,00	161.280.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.997.830.000,00	0,00	(2.997.830.000,00)	(100,00)				
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.997.830.000,00	0,00	(2.997.830.000,00)	(100,00)				
5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.480.700.000,00	1.480.700.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.06.01	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.480.700.000,00	1.480.700.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	722.838.498.851,60	741.695.416.251,60	18.856.917.400,00	2,61				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3 (Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.224.235.022,00	21.036.235.022,00	(188.000.000,00)	(0,89)		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.617.835.320,00	10.534.835.320,00	(83.000.000,00)	(0,78)		
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.619.190.940,00	1.619.190.940,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	530.841.600,00	530.841.600,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.678.951.932,00	1.678.951.932,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.355.215.230,00	2.355.215.230,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/ Rapat / Pertemuan	3.418.100.000,00	3.313.100.000,00	(105.000.000,00)	(3,07)		
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Dokumentasi Habis Pakai	256.400.000,00	256.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.11	Belanja Plakety/Pandel	315.100.000,00	315.100.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.12	Belanja Peralatan Kesenian	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.13	Belanja Penunjuk Info SKPD	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Medis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.15	Belanja Kotak Avsip	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.689.023.782,00	11.689.023.782,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	637.500.000,00	637.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	606.500.000,00	606.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.06	Belanja Perseediaan Makanan Pokok	1.418.600.000,00	1.418.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Pamteran/Expo	1.170.250.300,00	1.170.250.300,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.08	Belanja Pemberian Penghargaan/Cenderamata, Hadiah dan Plagam	4.458.753.000,00	4.458.753.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Non Aset Tetap)	1.747.588.482,00	1.747.588.482,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pakan Ternak	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Papan Nama Aset	212.200.000,00	212.200.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Perlengkapan Lainnya	917.632.000,00	917.632.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.753.697.400,00	91.833.697.400,00	80.000.000,00	0,09		
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.055.540.000,00	1.055.540.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.621.840.000,00	1.621.840.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.505.608.000,00	12.505.608.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.087.277.500,00	2.087.277.500,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.832.680.000,00	5.832.680.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.127.961.200,00	1.127.961.200,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5. 2. 2. 03. 08	Belanja Sertifikasi	679.123.000,00	679.123.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 12	Belanja Jasa Cleaning Service/Kebersihan	7.492.030.000,00	7.492.030.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 13	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan/Event Organizer	1.899.700.000,00	1.899.700.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 14	Belanja Publikasi	34.925.612.200,00	34.925.612.200,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 15	Belanja Jasa Administrasi Kemitraan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 16	Belanja Jasa Dekorasi	1.384.000.000,00	1.384.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Marasumber	18.627.600.500,00	18.707.600.500,00	80.000.000,00	0,43			
5. 2. 2. 03. 18	Belanja Make Up	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 19	Belanja Jasa Pengamanan	2.034.725.000,00	2.034.725.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 20	Belanja Kebutuhan Penghuni Panti	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 21	Belanja PBB	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 03. 22	Belanja Jasa Layanan Server	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 04	Belanja Premi Asuransi	3.652.829.500,00	3.652.829.500,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 04. 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.940.829.500,00	1.940.829.500,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 04. 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 04. 03	Belanja General Check Up	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.560.900.030,80	23.560.900.030,80	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05. 01	Belanja Jasa Service	4.400.886.040,00	4.400.886.040,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05. 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.064.802.580,00	5.064.802.580,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05. 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.356.158.600,00	12.356.158.600,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05. 04	Belanja Jasa KIR	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05. 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	776.352.810,80	776.352.810,80	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05. 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	847.500.000,00	847.500.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 05. 09	Belanja penggantian aksesoris kendaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 06	Belanja Cetak dan Pengandaan	13.232.506.820,00	13.235.006.820,00	2.500.000,00	0,02			
5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	8.698.644.070,00	8.704.144.070,00	5.500.000,00	0,06			
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Pengandaan	3.412.721.650,00	3.409.721.650,00	(3.000.000,00)	(0,09)			
5. 2. 2. 06. 03	Belanja Penjilidan	1.121.141.100,00	1.121.141.100,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.500.550.125,00	28.639.050.125,00	138.500.000,00	0,49			
5. 2. 2. 07. 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 07. 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.091.300.000,00	17.251.300.000,00	160.000.000,00	0,94			
5. 2. 2. 07. 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.713.250.125,00	7.691.750.125,00	(21.500.000,00)	(0,28)			
5. 2. 2. 07. 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambah/Hanggar Sarana Mobiltas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 07. 06	Belanja sewa penginapan/hotel	3.196.000.000,00	3.196.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 08	Belanja Sewa Sarana Mobiltas	3.405.200.000,00	3.405.200.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 08. 01	Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat	2.319.100.000,00	2.319.100.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	146.100.000,00	146.100.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	940.000.000,00	940.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	3.679.054.700,00	3.679.054.700,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	676.454.700,00	676.454.700,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	139.500.000,00	139.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem/ Elektone	360.500.000,00	360.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Bandwidth	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perengkapan Lainnya	1.931.600.000,00	1.931.600.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Colocation Server	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.223.248.242,00	39.287.748.242,00	64.500.000,00	0,16			
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	442.440.000,00	442.440.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.617.990.492,00	13.597.990.492,00	(20.000.000,00)	(0,15)			
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.843.025.000,00	5.853.025.000,00	10.000.000,00	0,17			
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan	19.319.792.750,00	19.394.292.750,00	74.500.000,00	0,39			
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	702.500.000,00	702.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.06	Belanja atribut lainnya	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	422.550.000,00	422.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	422.550.000,00	422.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14	Belanja Pakaian Knusus dan hari-hari tertentu	1.105.625.000,00	1.105.625.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Lainnya	576.225.000,00	576.225.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.468.117.358,80	150.552.617.358,80	84.500.000,00	0,06			
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.234.988.516,50	62.019.988.516,50	(215.000.000,00)	(0,35)			
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.930.812.842,30	81.230.312.842,30	299.500.000,00	0,37			
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	7.302.316.000,00	7.302.316.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5. 2. 2. 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 16. 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 16. 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.063.487.000,00	9.813.487.000,00	(250.000.000,00)	(2,48)			
5. 2. 2. 17. 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.957.610.000,00	5.957.610.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 17. 02	Belanja Sosialisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 17. 03	Belanja Bimbingan Teknis	3.605.877.000,00	3.355.877.000,00	(250.000.000,00)	(6,93)			
5. 2. 2. 20	Belanja Pemeliharaan	19.969.766.500,00	13.371.800.400,00	(6.597.966.100,00)	(33,04)			
5. 2. 2. 20. 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.878.601.500,00	3.878.601.500,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 20. 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.765.400.000,00	7.167.433.900,00	(6.597.966.100,00)	(47,93)			
5. 2. 2. 20. 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.003.765.000,00	2.003.765.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 20. 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 20. 08	Belanja Jasa Pemasangan dan Instalasi Infrastruktur	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 21	Belanja Jasa Konsultansi	54.306.223.300,00	54.306.223.300,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 21. 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	6.585.423.300,00	6.585.423.300,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 21. 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41.560.100.000,00	41.560.100.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 21. 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.313.000.000,00	2.313.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 21. 04	Belanja Jasa Konsultansi Jasa Lainnya	3.847.700.000,00	3.847.700.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga	109.242.631.300,00	109.242.631.300,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 23. 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.039.456.300,00	15.039.456.300,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 23. 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak ketiga	94.203.175.000,00	94.203.175.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 26	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga	986.756.250,00	986.756.250,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 26. 01	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga	986.756.250,00	986.756.250,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 27	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.967.835.000,00	20.982.835.000,00	15.000.000,00	0,07			
5. 2. 2. 27. 01	Belanja Transportasi	9.043.835.000,00	9.043.835.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 27. 02	Belanja Akomodasi	7.457.200.000,00	7.472.200.000,00	15.000.000,00	0,20			
5. 2. 2. 27. 03	Belanja Uang Saku Peserta	4.466.800.000,00	4.466.800.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 28	Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	468.760.000,00	468.760.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 28. 05	Belanja Pengadaan Alat Kantor dibawah Kapitalisasi	355.430.000,00	355.430.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 28. 06	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga dibawah Kapitalisasi	107.330.000,00	107.330.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 28. 07	Belanja Pengadaan Alat Komputer dibawah Kapitalisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3		6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3		6	7		
5. 2. 2. 29	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.319.524.000,00	1.319.524.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 2. 29. 02	Belanja Beasiswa S1	1.319.524.000,00	1.319.524.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 2. 30	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	95.668.457.521,00	0,00	0,00				
5. 2. 2. 30. 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	95.668.457.521,00	0,00	0,00				
5. 2. 2. 31	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.235.020.000,00	41.742.903.500,00	25.507.883.500,00	157,12				
5. 2. 2. 31. 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.235.020.000,00	41.742.903.500,00	25.507.883.500,00	157,12				
5. 2. 3	<b>Belanja Modal</b>	951.352.690.355,28	961.650.372.955,28	10.297.682.600,00	1,08				
5. 2. 3. 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	2.761.700.000,00	2.761.700.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 07. 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau	2.761.700.000,00	2.761.700.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	59.312.250.000,00	59.312.250.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 11. 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G: Tempal Tinggal	2.377.500.000,00	2.377.500.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 11. 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	56.134.750.000,00	56.134.750.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 11. 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 16. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.481.000.000,00	20.481.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 17. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.289.000.000,00	9.289.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 17. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	6.059.600.000,00	6.059.600.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 17. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 17. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.972.400.000,00	2.972.400.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 17. 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 19. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 19. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.2.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyiraman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyiraman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.450.673.000,00	5.450.673.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	93.080.000,00	93.080.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Penganda)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	575.600.000,00	575.600.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.640.493.000,00	4.640.493.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.240.566.000,00	3.240.566.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.006.700.000,00	1.006.700.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	203.600.000,00	203.600.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	784.500.000,00	784.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	750.640.000,00	750.640.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	229.126.000,00	229.126.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.088.089.700,00	12.088.089.700,00	0,00	0,00				



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	6.282.000.000,00	6.282.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.151.250.000,00	3.151.250.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	88.689.700,00	88.689.700,00	0,00	0,00				
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	264.500.000,00	264.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	496.300.000,00	496.300.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.805.350.000,00	1.805.350.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	508.550.000,00	508.550.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	151.700.000,00	151.700.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	150.350.000,00	150.350.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.665.018.000,00	1.665.018.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	999.018.000,00	999.018.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.31.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5. 2. 3. 32. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 33. 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	55.713.192.000,00	55.713.192.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 34. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	54.484.192.000,00	54.484.192.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 34. 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 34. 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 36. 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 36. 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	15.840.504.158,00	15.840.504.158,00	0,00			
5. 2. 3. 37. 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	0,00	422.475.550,00	422.475.550,00	0,00			
5. 2. 3. 37. 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Keahlihan	0,00	15.418.028.608,00	15.418.028.608,00	0,00			
5. 2. 3. 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 39. 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persejajataan Non Senjata Api	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 45. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 48. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 48. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	490.974.330.586,00	481.731.792.528,00	(9.242.538.058,00)	(1,88)			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	451.105.410.586,00	451.105.410.586,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	6.099.500.000,00	6.099.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	14.344.000.000,00	16.077.439.442,00	1.733.439.442,00	12,08		
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.000.000.000,00	2.024.022.500,00	(10.975.977.500,00)	(84,43)		
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.690.420.000,00	5.690.420.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.012.500.000,00	20.012.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	20.012.500.000,00	20.012.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	3.104.750.000,00	3.104.750.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	2.154.750.000,00	2.154.750.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	124.869.470.000,00	124.869.470.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.59.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	124.869.470.000,00	124.869.470.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	33.455.261.000,00	33.455.261.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.60.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi	29.955.261.000,00	29.955.261.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		
5. 2. 3. 60. 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Peryeberangan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	35.878.749.649,08	35.878.749.649,08	0,00	0,00			
5. 2. 3. 61. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	29.753.513.362,80	29.753.513.362,80	0,00	0,00			
5. 2. 3. 61. 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	6.125.236.286,28	6.125.236.286,28	0,00	0,00			
5. 2. 3. 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sungai dan Perangkulangan Be	33.311.775.420,20	33.364.775.420,20	53.000.000,00	0,16			
5. 2. 3. 64. 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	19.591.294.350,20	19.591.294.350,20	0,00	0,00			
5. 2. 3. 64. 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	9.460.906.070,00	9.460.906.070,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 64. 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	4.259.575.000,00	4.312.575.000,00	53.000.000,00	1,24			
5. 2. 3. 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.064.660.000,00	3.064.660.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 66. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	3.064.660.000,00	3.064.660.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 69. 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 73. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	3.660.263.000,00	0,00	(3.660.263.000,00)	(100,00)			
5. 2. 3. 73. 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00			
5. 2. 3. 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	430.800.000,00	430.800.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 82. 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	397.300.000,00	397.300.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 82. 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 82. 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 83. 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.243.490.000,00	10.699.354.500,00	2.455.864.500,00	29,79	29,79	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.243.490.000,00	10.699.354.500,00	2.455.864.500,00	29,79	29,79	
5.2.3.91	Belanja Modal Aset lainnya - Software	6.113.208.000,00	6.113.208.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.91.01	Belanja Modal Aset lainnya - Software	6.113.208.000,00	6.113.208.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.92	Belanja Modal Aset lainnya - Master Plan	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset lainnya - Master Plan	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.93	Belanja Modal Aset lainnya - DED	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.93.01	Belanja Modal Aset lainnya - DED	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.95	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.95.01	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.96	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	1.190.852.000,00	1.190.852.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.96.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	1.190.852.000,00	1.190.852.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(647.179.906.623,68)	(647.179.906.623,68)	0,00	0,00	0,00	
6	<b>PEMBAYARAN DAERAH</b>						
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%			
1								
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00			
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00			
6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>							
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00			
6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00			
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>							
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd




IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Zainuddin Hz, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Suwoko, S.H., M.H	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Purnomo, Mm	Pt. Kepala BPRAD	

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan Romawi V Perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Gubernur melakukan penyesuaian APBD sehingga menetapkan Perubahan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 419.868.015.909,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 419.868.015.909,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 1.800.696.737.000,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.800.696.737.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 114.588.229.671,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 114.588.229.671,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.335.152.982.580,00
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 537.505.205.303,80
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 537.505.205.303,80
2) Belanja Bunga	
a) Semula	Rp. 7.150.492.707,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 7.150.492.707,00
3) Belanja Subsidi	
a) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
4) Belanja hibah	
a) Semula	Rp. 228.199.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 29.154.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 199.044.400.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp. 133.939.198.286,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 133.939.198.286,00

7) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp. 188.276.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 188.276.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 1.097.915.296.296,80
<b>b. Belanja Langsung</b>	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 181.071.803.700,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 181.071.803.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp. 722.838.498.851,60
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 18.856.917.400,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 741.695.416.251,60
3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 951.352.690.355,28
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 10.297.682.600,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 961.650.372.955,28
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	<u>Rp.1.884.417.592.906,88</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/Defisit	<u>Rp.2.982.332.889.203,68</u>
	Rp. (647.179.906.623,68)
<b>c. Pembiayaan :</b>	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp. 647.179.906.623,68
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 647.179.906.623,68

2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>647.179.906.623,68</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	0,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A sebagaimana tercantum pada lampiran I dan I.a Peraturan Gubernur ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A adalah memuat perubahan anggaran, penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Bidang Energi Skala Kecil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang turun setelah APBD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.a Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 34 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.335.152.982.580,00	2.335.152.982.580,00	0,00	0,00	0,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	419.868.015.909,00	419.868.015.909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	293.334.558.388,00	293.334.558.388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.393.457.521,00	126.393.457.521,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.800.696.737.000,00	1.800.696.737.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	329.295.149.000,00	329.295.149.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	308.016.815.000,00	308.016.815.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	114.588.229.671,00	114.588.229.671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	969.480.000,00	969.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	2.982.332.889.203,68	2.982.332.889.203,68	0,00	0,00	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.127.069.896.296,80	1.097.915.296.296,80	(29.154.600.000,00)	(2,59)	
2.1.1	Belanja Pegawai	537.505.205.303,80	537.505.205.303,80	0,00	0,00	
2.1.2	Belanja Bunga	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	228.199.000.000,00	199.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(12,78)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	188.276.000.000,00	188.276.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.855.262.992.906,88	1.884.417.592.906,88	29.154.600.000,00	1,57	
2.2.1	Belanja Pegawai	181.071.803.700,00	181.071.803.700,00	0,00	0,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	722.838.498.851,60	741.695.416.251,60	18.856.917.400,00	2,61	
2.2.3	Belanja Modal	951.352.690.355,28	961.650.372.955,28	10.297.682.600,00	1,08	
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD		10				



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6 %
1					
	SURPLUS / (DEFISIT)	(647.179.906.623,68)	(647.179.906.623,68)	0,00	0,00
3	<b>PEMBLAYAAN DAERAH</b>				
3 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBAYAAN DAERAH</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00
	PEMBLAYAAN NETTO	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE



**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN Ia  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016  
PUNJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%			
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		
4	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.335.152.982.580,00	2.335.152.982.580,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	419.868.015.909,00	419.868.015.909,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	293.334.558.388,00	293.334.558.388,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	65.159.038.013,00	65.159.038.013,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.01	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	17.893.723.751,00	17.893.723.751,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.02	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	301.234.006,00	301.234.006,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.03	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	177.809.220,00	177.809.220,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.04	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.05	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	17.181.160.425,00	17.181.160.425,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.06	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	602.501.279,00	602.501.279,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.07	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.08	E. Sepeda Motor	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.09	Pajak Kendaraan Bermotor	24.764.893.885,00	24.764.893.885,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.11	G. Kendaraan Berat/ Besar	287.675.447,00	287.675.447,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.01.12	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.911.000.000,00	3.911.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	81.348.954.375,00	81.348.954.375,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.01	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	27.273.942.599,00	27.273.942.599,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.02	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	34.238.000,00	34.238.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.03	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	306.200.000,00	306.200.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.04	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.05	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	17.002.923.685,00	17.002.923.685,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.06	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.07	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.08	E. Sepeda Motor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.09	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	35.057.591.225,00	35.057.591.225,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.11	G. Kendaraan Berat/ Besar	17.858.866,00	17.858.866,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.03.12	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	111.000.000.000,00	111.000.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.1.05.06	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	111.000.000.000,00	111.000.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
4.1.1.06	Pajak Air Permukiman	658.500.000,00	658.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.06.01	Pajak Air Permukiman	658.500.000,00	658.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.07	Pajak Rokok	35.168.066.000,00	35.168.066.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.07.01	Pajak Rokok	35.168.066.000,00	35.168.066.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	126.393.457.521,00	126.393.457.521,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	116.668.457.521,00	116.668.457.521,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	116.668.457.521,00	116.668.457.521,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	<b>DANA PERTIMBANGAN</b>	1.800.696.737.000,00	1.800.696.737.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	329.295.149.000,00	329.295.149.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	73.360.332.000,00	73.360.332.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	37.956.122.000,00	37.956.122.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	28.213.668.000,00	28.213.668.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	3.829.149.000,00	3.829.149.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	3.361.393.000,00	3.361.393.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	255.934.817.000,00	255.934.817.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Turan Hak Pengusahaan Hutan	17.622.080.000,00	17.622.080.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	10.625.264.000,00	10.625.264.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	126.560.004.000,00	126.560.004.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Turan Tetap (Land-Rent)	6.080.819.000,00	6.080.819.000,00	0,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>BELANJA</b>	2.982.332.889.203,68	2.982.332.889.203,68	0,00	0,00	0,00			
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.127.069.896.296,80	1.097.915.296.296,80	(29.154.600.000,00)	(2,59)				
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	537.505.205.303,80	537.505.205.303,80	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	290.051.036.932,75	290.051.036.932,75	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	184.029.596.566,20	182.809.596.566,20	(1.220.000.000,00)	(0,66)				
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	19.384.001.267,01	19.384.001.267,01	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	18.817.359.716,03	19.037.359.716,03	220.000.000,00	1,17				
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.237.137.340,00	27.237.137.340,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.505.507.119,99	6.505.507.119,99	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	11.663.934.224,58	12.663.934.224,58	1.000.000.000,00	8,57				
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.307.554.393,00	3.307.554.393,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	113.533.152,19	113.533.152,19	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.342.358.283,75	7.342.358.283,75	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.10	Uang Paket	98.154.000,00	98.154.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	79.448.775,00	79.448.775,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	76.244.625,00	76.244.625,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	62.868.375,00	62.868.375,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kelembagaan Lainnya	13.643.775,00	13.643.775,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelembagaan	912.181.325,00	912.181.325,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.01.22	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.165.913.995,00	1.165.913.995,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	228.935.668.371,05	228.935.668.371,05	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	227.153.668.371,05	227.153.668.371,05	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.091.500.000,00	10.091.500.000,00	0,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.040.500.000,00	9.040.500.000,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Gubernur / Wakil Gubernur	1.051.000.000,00	1.051.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	8.427.000.000,00	8.427.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	8.427.000.000,00	8.427.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.2	<b>Belanja Bunga</b>						
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00		
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>						
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>						
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	138.199.000.000,00	109.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(21,10)		
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD	133.463.000.000,00	68.107.600.000,00	(65.355.400.000,00)	(48,97)		
5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP	0,00	31.032.000.000,00	31.032.000.000,00	0,00		
5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA	0,00	3.731.000.000,00	3.731.000.000,00	0,00		
5.1.4.07.04	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK	0,00	1.437.800.000,00	1.437.800.000,00	0,00		
5.1.4.07.05	Belanja Hibah Dana BOS ke Sekolah Swasta	4.736.000.000,00	4.736.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>						
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>						
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00		
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00		
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>						
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	188.276.000.000,00	188.276.000.000,00	0,00	0,00		
		185.776.000.000,00	185.776.000.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1								
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan	28.649.000,00	28.649.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.7.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tarakan	50.412.000,00	50.412.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.7.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Nunukan	62.153.000,00	62.153.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.7.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Malinau	23.438.000,00	23.438.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.7.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tana Tidung	21.124.000,00	21.124.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.855.262.992.906,88	1.884.417.592.906,88	29.154.600.000,00	1,57			
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	181.071.803.700,00	181.071.803.700,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.01	Honorarium PNS	92.984.391.700,00	93.044.391.700,00	60.000.000,00	0,06			
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.417.330.000,00	78.408.930.000,00	(8.400.000,00)	(0,01)			
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang Dan Jasa	4.580.975.100,00	4.664.975.100,00	84.000.000,00	1,83			
5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.400.000,00	327.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.253.395.000,00	7.259.395.000,00	6.000.000,00	0,08			
5.2.1.01.05	Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan	2.324.791.600,00	2.303.191.600,00	(21.600.000,00)	(0,93)			
5.2.1.01.06	Honorarium Verifikasi Dana Hibah dan Bansos	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68.447.602.000,00	71.385.432.000,00	2.937.830.000,00	4,29			
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	995.000.000,00	995.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	67.452.602.000,00	70.390.432.000,00	2.937.830.000,00	4,36			
5.2.1.03	Uang Lembur	161.280.000,00	161.280.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	161.280.000,00	161.280.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.04	Honorarium Penggelola Dana BOS	2.997.830.000,00	0,00	(2.997.830.000,00)	(100,00)			
5.2.1.04.01	Honorarium Penggelola Dana BOS	2.997.830.000,00	0,00	(2.997.830.000,00)	(100,00)			
5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.480.700.000,00	1.480.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.06.01	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.480.700.000,00	1.480.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	722.838.498.851,60	741.695.416.251,60	18.856.917.400,00	2,61			

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.224.235.022,00	21.036.235.022,00	(188.000.000,00)	(0,89)		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.617.835.320,00	10.534.835.320,00	(83.000.000,00)	(0,78)		
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.619.190.940,00	1.619.190.940,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	530.841.600,00	530.841.600,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.678.951.932,00	1.678.951.932,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.355.215.230,00	2.355.215.230,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.09	Belanja Pertengakapan Peserta Pelatihan/ Rapat / Pertemuan	3.418.100.000,00	3.313.100.000,00	(105.000.000,00)	(3,07)		
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Dokumentasi Habis Pakai	256.400.000,00	256.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.11	Belanja Plaket/Pandel	315.100.000,00	315.100.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.12	Belanja Peralatan Kesenian	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.13	Belanja Penunjuk Info SKPD	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.14	Belanja Pertengakapan Medis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.15	Belanja Kotak Arsip	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.689.023.782,00	11.689.023.782,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	637.500.000,00	637.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	606.500.000,00	606.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.418.600.000,00	1.418.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Pamoran/Expo	1.170.250.300,00	1.170.250.300,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.08	Belanja Pemberian Penghargaan/Cenderamata, Hadiah dan Piagam	4.458.753.000,00	4.458.753.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perengakapan dan Peralatan (Non Aset Tetap)	1.747.588.482,00	1.747.588.482,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pakan Ternak	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Papan Nama Aset	212.200.000,00	212.200.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Perengakapan Lainnya	917.632.000,00	917.632.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.753.697.400,00	91.833.697.400,00	80.000.000,00	0,09		
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.055.540.000,00	1.055.540.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.621.840.000,00	1.621.840.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.505.608.000,00	12.505.608.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.087.277.500,00	2.087.277.500,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intanet/TV Kabel/TV Satelit	5.832.680.000,00	5.832.680.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Fengiriman	1.127.961.200,00	1.127.961.200,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	679.123.000,00	679.123.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service/Kebersihan	7.492.030.000,00	7.492.030.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan/Event Organizer	1.899.700.000,00	1.899.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.14	Belanja Publikasi	34.925.612.200,00	34.925.612.200,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Administrasi Kemitraan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.16	Belanja Dekorasi	1.384.000.000,00	1.384.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.627.600.500,00	18.707.600.500,00	80.000.000,00	0,43			
5.2.2.03.18	Belanja Make Up	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pengamanan	2.034.725.000,00	2.034.725.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.20	Belanja Kebutuhan Pughuni Pariti	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.21	Belanja PBB	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Server	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.652.829.500,00	3.652.829.500,00	0,00	0,00			
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.940.829.500,00	1.940.829.500,00	0,00	0,00			
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.04.03	Belanja General Check Up	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.560.900.030,80	23.560.900.030,80	0,00	0,00			
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.400.886.040,00	4.400.886.040,00	0,00	0,00			
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.064.802.580,00	5.064.802.580,00	0,00	0,00			
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.356.158.600,00	12.356.158.600,00	0,00	0,00			
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	776.352.810,80	776.352.810,80	0,00	0,00			
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	847.500.000,00	847.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.05.09	Belanja penggantian aksesoris kendaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	13.232.506.820,00	13.235.006.820,00	2.500.000,00	0,02			
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.698.644.070,00	8.704.144.070,00	5.500.000,00	0,06			
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.412.721.650,00	3.409.721.650,00	(3.000.000,00)	(0,09)			
5.2.2.06.03	Belanja Penjualan	1.121.141.100,00	1.121.141.100,00	0,00	0,00			
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.500.550.125,00	28.639.050.125,00	138.500.000,00	0,49			
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.091.300.000,00	17.251.300.000,00	160.000.000,00	0,94			
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.713.250.125,00	7.691.750.125,00	(21.500.000,00)	(0,28)			
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambah/Hanggar Sarana Mobiltas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.07.06	Belanja sewa penginapan/hotel	3.196.000.000,00	3.196.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobiltas	3.405.200.000,00	3.405.200.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat	2.319.100.000,00	2.319.100.000,00	0,00	0,00			

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAJA DAN PENBELAJAN



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	146.100.000,00	146.100.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	940.000.000,00	940.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.679.054.700,00	3.679.054.700,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	676.454.700,00	676.454.700,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaihan Adat/Tradisional	139.500.000,00	139.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem/ Elektone	360.500.000,00	360.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Bandwidth	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	1.931.600.000,00	1.931.600.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Colocation Server	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.223.248.242,00	39.287.748.242,00	64.500.000,00	0,16			
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	442.440.000,00	442.440.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.617.990.492,00	13.597.990.492,00	(20.000.000,00)	(0,15)			
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.843.025.000,00	5.853.025.000,00	10.000.000,00	0,17			
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan	19.319.792.750,00	19.394.292.750,00	74.500.000,00	0,39			
5.2.2.12	Belanja Pakaihan Dinas dan Atributnya	702.500.000,00	702.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.01	Belanja Pakaihan Dinas KDH Dan WKDH	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.02	Belanja Pakaihan Sipil Harian (PSH)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.03	Belanja Pakaihan Sipil Lengkap (PSL)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.04	Belanja Pakaihan Dinas Harian (PDH)	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.06	Belanja atribut lainnya	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.13	Belanja Pakaihan Kerja	422.550.000,00	422.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.13.01	Belanja Pakaihan Kerja Lapangan	422.550.000,00	422.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14	Belanja Pakaihan Khusus dan hari-hari tertentu	1.105.625.000,00	1.105.625.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.02	Belanja Pakaihan Adat Daerah	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.03	Belanja Pakaihan Batik Tradisional	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.04	Belanja Pakaihan Olahraga	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.05	Belanja Pakaihan Khusus Hari - hari Tertentu Lainnya	576.225.000,00	576.225.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.468.117.358,80	150.552.617.358,80	84.500.000,00	0,06			
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.234.988.516,50	62.019.988.516,50	(215.000.000,00)	(0,35)			
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.930.812.842,30	81.230.312.842,30	299.500.000,00	0,37			
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	7.302.316.000,00	7.302.316.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1								
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.063.487.000,00	9.813.487.000,00	(250.000.000,00)	(2,48)			
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.957.610.000,00	5.957.610.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	3.605.877.000,00	3.355.877.000,00	(250.000.000,00)	(6,93)			
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.969.766.500,00	13.371.800.400,00	(6.597.966.100,00)	(33,04)			
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.878.601.500,00	3.878.601.500,00	0,00	0,00			
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.765.400.000,00	7.167.433.900,00	(6.597.966.100,00)	(47,93)			
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.003.765.000,00	2.003.765.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.20.08	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Instalasi Infrastruktur	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	54.306.223.300,00	54.306.223.300,00	0,00	0,00			
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	6.585.423.300,00	6.585.423.300,00	0,00	0,00			
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41.560.100.000,00	41.560.100.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.313.000.000,00	2.313.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Jasa Lainnya	3.847.700.000,00	3.847.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.242.631.300,00	109.242.631.300,00	0,00	0,00			
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.039.456.300,00	15.039.456.300,00	0,00	0,00			
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	94.203.175.000,00	94.203.175.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.26	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	986.756.250,00	986.756.250,00	0,00	0,00			
5.2.2.26.01	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	986.756.250,00	986.756.250,00	0,00	0,00			
5.2.2.27	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.967.835.000,00	20.982.835.000,00	15.000.000,00	0,07			
5.2.2.27.01	Belanja Transportasi	9.043.835.000,00	9.043.835.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.27.02	Belanja Akomodasi	7.457.200.000,00	7.472.200.000,00	15.000.000,00	0,20			
5.2.2.27.03	Belanja Uang Saku Peserta	4.466.800.000,00	4.466.800.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.28	Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	468.760.000,00	468.760.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.28.05	Belanja Pengadaan Alat Kantor dibawah Kapitalisasi	355.430.000,00	355.430.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.28.06	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga dibawah Kapitalisasi	107.330.000,00	107.330.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.28.07	Belanja Pengadaan Alat Komputer dibawah Kapitalisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3		6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3		6	7		
5. 2. 2. 29	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.319.524.000,00	1.319.524.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 29. 02	Belanja Beasiswa S1	1.319.524.000,00	1.319.524.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 30	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	95.668.457.521,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 30. 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	95.668.457.521,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 2. 31	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.235.020.000,00	41.742.903.500,00	25.507.883.500,00	157,12	157,12			
5. 2. 2. 31. 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.235.020.000,00	41.742.903.500,00	25.507.883.500,00	157,12	157,12			
5. 2. 3	<b>Belanja Modal</b>	951.352.690.355,28	961.650.372.955,28	10.297.682.600,00	1,08	1,08			
5. 2. 3. 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	2.761.700.000,00	2.761.700.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 07. 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau	2.761.700.000,00	2.761.700.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	59.312.250.000,00	59.312.250.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 11. 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	2.377.500.000,00	2.377.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 11. 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	56.134.750.000,00	56.134.750.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 11. 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 16. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.481.000.000,00	20.481.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 17. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.289.000.000,00	9.289.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 17. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	6.059.600.000,00	6.059.600.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 17. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 17. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.972.400.000,00	2.972.400.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 17. 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 19. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
5. 2. 3. 19. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6		
1							
5.2.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		7
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pereliharaan Tamanan/Alat Penyimpanan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.450.673.000,00	5.450.673.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	93.080.000,00	93.080.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	575.600.000,00	575.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.640.493.000,00	4.640.493.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.240.566.000,00	3.240.566.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.006.700.000,00	1.006.700.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	203.600.000,00	203.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	784.500.000,00	784.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	750.640.000,00	750.640.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	229.126.000,00	229.126.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.088.089.700,00	12.088.089.700,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	6.282.000.000,00	6.282.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.151.250.000,00	3.151.250.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	88.689.700,00	88.689.700,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	264.500.000,00	264.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	496.300.000,00	496.300.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.805.350.000,00	1.805.350.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	508.550.000,00	508.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	151.700.000,00	151.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	150.350.000,00	150.350.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.665.018.000,00	1.665.018.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	999.018.000,00	999.018.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Compuhng	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.33.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	55.713.192.000,00	55.713.192.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	54.484.192.000,00	54.484.192.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahasan Bangunan Konstruksi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	15.840.504.158,00	15.840.504.158,00	0,00				
5.2.3.37.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	0,00	422.475.550,00	422.475.550,00	0,00				
5.2.3.37.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	0,00	15.418.028.608,00	15.418.028.608,00	0,00				
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Muliir / Elektronika	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.45.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemaman	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	490.974.330.586,00	481.731.792.528,00	(9.242.538.058,00)	(1,88)				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	(Rp)	%	7		
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	451.105.410.586,00	451.105.410.586,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	6.099.500.000,00	6.099.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	14.344.000.000,00	16.077.439.442,00	1.733.439.442,00	12,08			
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.000.000.000,00	2.024.022.500,00	(10.975.977.500,00)	(84,43)			
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.690.420.000,00	5.690.420.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.012.500.000,00	20.012.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	20.012.500.000,00	20.012.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	3.104.750.000,00	3.104.750.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	2.154.750.000,00	2.154.750.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	124.869.470.000,00	124.869.470.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.59.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	124.869.470.000,00	124.869.470.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	33.455.261.000,00	33.455.261.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.60.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi	29.955.261.000,00	29.955.261.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5. 2. 3. 60. 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	35.878.749.649,08	35.878.749.649,08	0,00	0,00		
5. 2. 3. 61. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	29.753.513.362,80	29.753.513.362,80	0,00	0,00		
5. 2. 3. 61. 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	6.125.236.286,28	6.125.236.286,28	0,00	0,00		
5. 2. 3. 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	33.311.775.420,20	33.364.775.420,20	53.000.000,00	0,16		
5. 2. 3. 64. 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	19.591.294.350,20	19.591.294.350,20	0,00	0,00		
5. 2. 3. 64. 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	9.460.906.070,00	9.460.906.070,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 64. 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	4.259.575.000,00	4.312.575.000,00	53.000.000,00	1,24		
5. 2. 3. 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.064.660.000,00	3.064.660.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 66. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	3.064.660.000,00	3.064.660.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 69. 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 73. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	3.660.263.000,00	0,00	(3.660.263.000,00)	(100,00)		
5. 2. 3. 73. 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00		
5. 2. 3. 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	430.800.000,00	430.800.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 82. 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	397.300.000,00	397.300.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 82. 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 82. 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tertbitan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 83. 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00		



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.243.490.000,00	10.699.354.500,00	2.455.864.500,00	29,79		
5.2.3.90.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.243.490.000,00	10.699.354.500,00	2.455.864.500,00	29,79		
5.2.3.91	Belanja Modal Aset lainnya - Software	6.113.208.000,00	6.113.208.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.91.01	Belanja Modal Aset lainnya - Software	6.113.208.000,00	6.113.208.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.92	Belanja Modal Aset lainnya - Master Plan	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset lainnya - Master Plan	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.93	Belanja Modal Aset Lainnya - DED	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.93.01	Belanja Modal Aset lainnya - DED	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.95	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.95.01	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.96	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	1.190.852.000,00	1.190.852.000,00	0,00		
5.2.3.96.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	1.190.852.000,00	1.190.852.000,00	0,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(647.179.906.623,68)</b>	<b>(647.179.906.623,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00		
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESEERAN	SETELAH PERGESEERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000,00	306.500.000,00	0,00	0,00		
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000,00	306.500.000,00	0,00	0,00		
6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	340.679.906,68	340.679.906,68	0,00	0,00		
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	340.679.906,68	340.679.906,68	0,00	0,00		
6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	340.679.906,68	340.679.906,68	0,00	0,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	647.179.906,68	647.179.906,68	0,00	0,00		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan Romawi V Perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Gubernur melakukan penyesuaian APBD sehingga menetapkan Perubahan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1A**

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 419.868.015.909,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah Perubahan Rp. 419.868.015.909,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.800.696.737.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan Rp. 1.800.696.737.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 114.588.229.671,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 114.588.229.671,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.335.152.982.580,00
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 537.505.205.303,80
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 537.505.205.303,80
2) Belanja Bunga	
a) Semula	Rp. 7.150.492.707,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 7.150.492.707,00
3) Belanja Subsidi	
a) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
4) Belanja hibah	
a) Semula	Rp. 228.199.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 29.154.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 199.044.400.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp. 133.939.198.286,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 133.939.198.286,00



7) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp. 188.276.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 188.276.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 1.097.915.296.296,80
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 181.071.803.700,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 181.071.803.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp. 722.838.498.851,60
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 18.856.917.400,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 741.695.416.251,60
3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 951.352.690.355,28
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 10.297.682.600,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 961.650.372.955,2
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	<u>Rp.1.884.417.592.906,88</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/Defisit	<u>Rp.2.982.332.889.203,68</u> Rp. (647.179.906.623,68)
c. Pembiayaan :	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp. 647.179.906.623,68
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 647.179.906.623,68

2) Pengeluaran

a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>647.179.906.623,68</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	0,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A sebagaimana tercantum pada lampiran I dan I.a Peraturan Gubernur ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A adalah memuat perubahan anggaran, penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Bidang Energi Skala Kecil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang turun setelah APBD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.a Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DRS. H. BADRUN, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	DRS. ZAINUDDIN HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	DJOKO ISWORD, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	DRS. PURNOMO, MM	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	


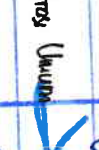
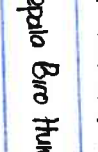
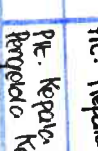
LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.335.152.982.580,00	2.335.152.982.580,00	0,00	0,00	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	419.868.015.909,00	419.868.015.909,00	0,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	293.334.558.388,00	293.334.558.388,00	0,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.393.457.521,00	126.393.457.521,00	0,00	0,00	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.800.696.737.000,00	1.800.696.737.000,00	0,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	329.295.149.000,00	329.295.149.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	308.016.815.000,00	308.016.815.000,00	0,00	0,00	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	114.588.229.671,00	114.588.229.671,00	0,00	0,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	969.480.000,00	969.480.000,00	0,00	0,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00	
2	<b>BELANJA</b>	2.982.332.889.203,68	2.982.332.889.203,68	0,00	0,00	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.127.069.896.296,80	1.097.915.296.296,80	(29.154.600.000,00)	(2,59)	
2.1.1	Belanja Pegawai	537.505.205.303,80	537.505.205.303,80	0,00	0,00	
2.1.2	Belanja Bunga	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	228.199.000.000,00	199.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(12,78)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	188.276.000.000,00	188.276.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.855.262.992.906,88	1.884.417.592.906,88	29.154.600.000,00	1,57	
2.2.1	Belanja Pegawai	181.071.803.700,00	181.071.803.700,00	0,00	0,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	722.838.498.851,60	741.695.416.251,60	18.856.917.400,00	2,61	
2.2.3	Belanja Modal	951.352.690.355,28	961.650.372.955,28	10.297.682.600,00	1,08	
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD		10				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1					
		(647.179.906.623,68)	(647.179.906.623,68)	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DRS. H. BADRUN, M. Si	Sekretaris Daerah	
2	DRS. ZAINUDDIN HZ, M. Si	Akisten Administrasi Umum	
3	DJOKO ISWARO, S.H., M.H	Pt. Kepala Biro Hukum	
4	DRS. RURNOMO, MM	Pt. Kepala Badan Pengada. Keu? Aset Daerah	

GOBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1								
4	<b>PENDAPATAN</b>							
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.335.152.982.580,00	2.335.152.982.580,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	419.868.015.909,00	419.868.015.909,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01	<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	293.334.558.388,00	293.334.558.388,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	65.159.038.013,00	65.159.038.013,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umunum)	17.893.723.751,00	17.893.723.751,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	301.234.006,00	301.234.006,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umunum)	177.809.220,00	177.809.220,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pick Up (Umunum)	17.181.160.425,00	17.181.160.425,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	602.501.279,00	602.501.279,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umunum)	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.11	Pajak Kendaraan Bermotor	24.764.893.885,00	24.764.893.885,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.01.12	G. Kendaraan Berat/ Besar	287.675.447,00	287.675.447,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	3.911.000.000,00	3.911.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	81.348.954.375,00	81.348.954.375,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umunum)	27.273.942.599,00	27.273.942.599,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	34.238.000,00	34.238.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umunum)	306.200.000,00	306.200.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pick Up (Umunum)	17.002.923.685,00	17.002.923.685,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umunum)	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.11	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	35.057.591.225,00	35.057.591.225,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.03.12	G. Kendaraan Berat/ Besar	17.858.866,00	17.858.866,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.05	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		
4.1.1.05.06	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	111.000.000.000,00	111.000.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETERAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
4.1.1.06	Pajak Air Permukaan	658.500.000,00	658.500.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.06.01	Pajak Air Permukaan	658.500.000,00	658.500.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.07	Pajak Rokok	35.168.066.000,00	35.168.066.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.07.01	Pajak Rokok	35.168.066.000,00	35.168.066.000,00	0,00	0,00			
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	126.393.457.521,00	126.393.457.521,00	0,00	0,00			
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	116.668.457.521,00	116.668.457.521,00	0,00	0,00			
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	116.668.457.521,00	116.668.457.521,00	0,00	0,00			
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.800.696.737.000,00	1.800.696.737.000,00	0,00	0,00			
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	329.295.149.000,00	329.295.149.000,00	0,00	0,00			
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	73.360.332.000,00	73.360.332.000,00	0,00	0,00			
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	37.956.122.000,00	37.956.122.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	28.213.668.000,00	28.213.668.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	3.829.149.000,00	3.829.149.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	3.361.393.000,00	3.361.393.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	255.934.817.000,00	255.934.817.000,00	0,00	0,00			
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	17.622.080.000,00	17.622.080.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	10.625.264.000,00	10.625.264.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	126.560.004.000,00	126.560.004.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	6.080.819.000,00	6.080.819.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	83.645.571.000,00	83.645.571.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	10.271.218.000,00	10.271.218.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.129.861.000,00	1.129.861.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00			
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00			
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.163.384.773.000,00	1.163.384.773.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	308.016.815.000,00	308.016.815.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	76.116.080.000,00	76.116.080.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	8.360.357.000,00	8.360.357.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	58.280.485.000,00	58.280.485.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	9.475.238.000,00	9.475.238.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	163.270.194.000,00	163.270.194.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Sekolah	133.463.000.000,00	133.463.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.3.02.03	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015		
4.2.3.02.04	Tunjangan Profesi Guru	24.549.755.000,00	24.549.755.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.02.05	Tambahan Penghasilan Guru	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.02.06	Tunjangan Khusus Guru	36.636.000,00	36.636.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.02.07	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.400.803.000,00	1.400.803.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	68.630.541.000,00	68.630.541.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.03.01	Bidang Pendidikan	27.049.173.000,00	27.049.173.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.03.02	Bidang Jalan	32.089.155.000,00	32.089.155.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.03.03	Bidang Irigasi	5.831.950.000,00	5.831.950.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.03.04	Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00	0,00			
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	114.588.229.671,00	114.588.229.671,00	0,00	0,00			
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	969.480.000,00	969.480.000,00	0,00	0,00			
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00			
4.3.1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00			
4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	674.280.000,00	674.280.000,00	0,00	0,00			
4.3.1.04.03	Sumbangan Pihak Ketiga	674.280.000,00	674.280.000,00	0,00	0,00			
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00			
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00			



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00				
4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00				
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00				
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	106.118.749.671,00	106.118.749.671,00	0,00	0,00				
5	<b>BELANJA</b>	2.982.332.889.203,68	2.982.332.889.203,68	0,00	0,00				
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.127.069.896.296,80	1.097.915.296.296,80	(29.154.600.000,00)	(2,59)				
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	537.505.205.303,80	537.505.205.303,80	0,00	0,00				
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	290.051.036.932,75	290.051.036.932,75	0,00	0,00				
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	184.029.596.566,20	182.809.596.566,20	(1.220.000.000,00)	(0,66)				
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	19.384.001.267,01	19.384.001.267,01	0,00	0,00				
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	18.817.359.716,03	19.037.359.716,03	220.000.000,00	1,17				
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.237.137.340,00	27.237.137.340,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.505.507.119,99	6.505.507.119,99	0,00	0,00				
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	11.663.934.224,58	12.663.934.224,58	1.000.000.000,00	8,57				
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.307.554.393,00	3.307.554.393,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.08	Penbulatan Gaji	113.533.152,19	113.533.152,19	0,00	0,00				
5.1.1.01.09	Turan Asuransi Kesehatan	7.342.358.283,75	7.342.358.283,75	0,00	0,00				
5.1.1.01.10	Uang Paket	98.154.000,00	98.154.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	79.448.775,00	79.448.775,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	76.244.625,00	76.244.625,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	62.868.375,00	62.868.375,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	13.643.775,00	13.643.775,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	912.181.325,00	912.181.325,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.17	Uang Duka Watat/Tewas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.01.22	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.165.913.995,00	1.165.913.995,00	0,00	0,00				
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	228.935.668.371,05	228.935.668.371,05	0,00	0,00				
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	227.153.668.371,05	227.153.668.371,05	0,00	0,00				
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	0,00	0,00				
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.091.500.000,00	10.091.500.000,00	0,00	0,00				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.040.500.000,00	9.040.500.000,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Gubernur / Wakil Gubernur	1.051.000.000,00	1.051.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	8.427.000.000,00	8.427.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	8.427.000.000,00	8.427.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.2	<b>Belanja Bunga</b>	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00		
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.150.492.707,00	7.150.492.707,00	0,00	0,00		
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	228.199.000.000,00	199.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(12,78)		
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	138.199.000.000,00	109.044.400.000,00	(29.154.600.000,00)	(21,10)		
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD	133.463.000.000,00	68.107.600.000,00	(65.355.400.000,00)	(48,97)		
5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP	0,00	31.032.000.000,00	31.032.000.000,00	0,00		
5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA	0,00	3.731.000.000,00	3.731.000.000,00	0,00		
5.1.4.07.04	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK	0,00	1.437.800.000,00	1.437.800.000,00	0,00		
5.1.4.07.05	Belanja Hibah Dana BOS ke Sekolah Swasta	4.736.000.000,00	4.736.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00		
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00		
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	133.939.198.286,00	133.939.198.286,00	0,00	0,00		
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	188.276.000.000,00	188.276.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	185.776.000.000,00	185.776.000.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESEERAN	SETELAH PERGESEERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan	28.649.000.000,00	28.649.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tarakan	50.412.000.000,00	50.412.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Nunukan	62.153.000.000,00	62.153.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Malinau	23.438.000.000,00	23.438.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.7.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tana Tidung	21.124.000.000,00	21.124.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.855.262.992.906,88	1.884.417.592.906,88	29.154.600.000,00	1,57			
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	181.071.803.700,00	181.071.803.700,00	0,00	0,00			
5.2.1.01	Honorarium PNS	92.984.391.700,00	93.044.391.700,00	60.000.000,00	0,06			
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.417.330.000,00	78.408.930.000,00	(8.400.000,00)	(0,01)			
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang Dan Jasa	4.580.975.100,00	4.664.975.100,00	84.000.000,00	1,83			
5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.400.000,00	327.400.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.253.395.000,00	7.259.395.000,00	6.000.000,00	0,08			
5.2.1.01.05	Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan	2.324.791.600,00	2.303.191.600,00	(21.600.000,00)	(0,93)			
5.2.1.01.06	Honorarium Verifikasi Dana Hibah dan Bansos	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68.447.602.000,00	71.385.432.000,00	2.937.830.000,00	4,29			
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	995.000.000,00	995.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	67.452.602.000,00	70.390.432.000,00	2.937.830.000,00	4,36			
5.2.1.03	Uang Lembur	161.280.000,00	161.280.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	161.280.000,00	161.280.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.997.830.000,00	0,00	(2.997.830.000,00)	(100,00)			
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.997.830.000,00	0,00	(2.997.830.000,00)	(100,00)			
5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.480.700.000,00	1.480.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.06.01	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.480.700.000,00	1.480.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	722.838.498.851,60	741.695.416.251,60	18.856.917.400,00	2,61			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.224.235.022,00	21.036.235.022,00	(188.000.000,00)	(0,89)			
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.617.835.320,00	10.534.835.320,00	(83.000.000,00)	(0,78)			
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.619.190.940,00	1.619.190.940,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	530.841.600,00	530.841.600,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.678.951.932,00	1.678.951.932,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.355.215.230,00	2.355.215.230,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.09	Belanja Perengkapan Peserta Pelatihan/ Rapat / Pertemuan	3.418.100.000,00	3.313.100.000,00	(105.000.000,00)	(3,07)			
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Dokumentasi Habis Pakai	256.400.000,00	256.400.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.11	Belanja Plakat/Pandel	315.100.000,00	315.100.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.12	Belanja Peralatan Kesenian	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.13	Belanja Penunjuk Info SKPD	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.14	Belanja Perengkapan Medis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.01.15	Belanja Kotak Arsip	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.689.023.782,00	11.689.023.782,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	637.500.000,00	637.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	606.500.000,00	606.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.418.600.000,00	1.418.600.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Pameran/Expo	1.170.250.300,00	1.170.250.300,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.08	Belanja Pemberian Penghargaan/Cenderamata, Hadiah dan Piagam	4.458.753.000,00	4.458.753.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perengkapan dan Peralatan (Non Aset Tetap)	1.747.588.482,00	1.747.588.482,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pakan Ternak	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Papan Nama Aset	212.200.000,00	212.200.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Perengkapan Lainnya	917.632.000,00	917.632.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.753.697.400,00	91.833.697.400,00	80.000.000,00	0,09			
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.055.540.000,00	1.055.540.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.621.840.000,00	1.621.840.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.505.608.000,00	12.505.608.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.087.277.500,00	2.087.277.500,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.832.680.000,00	5.832.680.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.127.961.200,00	1.127.961.200,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	679.123.000,00	679.123.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service/Kebersihan	7.492.030.000,00	7.492.030.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan/Event Organizer	1.899.700.000,00	1.899.700.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.14	Belanja Publikasi	34.925.612.200,00	34.925.612.200,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Administrasi Kemitraan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.16	Belanja Dekorasi	1.384.000.000,00	1.384.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.627.600.500,00	18.707.600.500,00	80.000.000,00	0,43				
5.2.2.03.18	Belanja Make Up	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pengamanan	2.034.725.000,00	2.034.725.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.20	Belanja Kebutuhan Penghuni Pantii	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.21	Belanja PBB	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Server	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.652.829.500,00	3.652.829.500,00	0,00	0,00				
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.940.829.500,00	1.940.829.500,00	0,00	0,00				
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.04.03	Belanja General Check Up	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.560.900.030,80	23.560.900.030,80	0,00	0,00				
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.400.886.040,00	4.400.886.040,00	0,00	0,00				
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.064.802.580,00	5.064.802.580,00	0,00	0,00				
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.356.158.600,00	12.356.158.600,00	0,00	0,00				
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	776.352.810,80	776.352.810,80	0,00	0,00				
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	847.500.000,00	847.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.05.09	Belanja penggantian aksesoris kendaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	13.232.506.820,00	13.235.006.820,00	2.500.000,00	0,02				
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.698.644.070,00	8.704.144.070,00	5.500.000,00	0,06				
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.412.721.650,00	3.409.721.650,00	(3.000.000,00)	(0,09)				
5.2.2.06.03	Belanja Penjilkan	1.121.141.100,00	1.121.141.100,00	0,00	0,00				
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.500.550.125,00	28.639.050.125,00	138.500.000,00	0,49				
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.091.300.000,00	17.251.300.000,00	160.000.000,00	0,94				
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.713.250.125,00	7.691.750.125,00	(21.500.000,00)	(0,28)				
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobiltas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.07.06	Belanja sewa penginapan/hotel	3.196.000.000,00	3.196.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobiltas	3.405.200.000,00	3.405.200.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat	2.319.100.000,00	2.319.100.000,00	0,00	0,00				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	146.100.000,00	146.100.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	940.000.000,00	940.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	3.679.054.700,00	3.679.054.700,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	676.454.700,00	676.454.700,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	139.500.000,00	139.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sisteny/ Elektone	360.500.000,00	360.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Bandwidth	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perengkapan Lainnya	1.931.600.000,00	1.931.600.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Colocation Server	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.223.248.242,00	39.287.748.242,00	64.500.000,00	0,16			
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	442.440.000,00	442.440.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.617.990.492,00	13.597.990.492,00	(20.000.000,00)	(0,15)			
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.843.025.000,00	5.853.025.000,00	10.000.000,00	0,17			
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan	19.319.792.750,00	19.394.292.750,00	74.500.000,00	0,39			
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	702.500.000,00	702.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.12.06	Belanja atribut lainnya	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	422.550.000,00	422.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	422.550.000,00	422.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1.105.625.000,00	1.105.625.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Lainnya	576.225.000,00	576.225.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.468.117.358,80	150.552.617.358,80	84.500.000,00	0,06			
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.234.988.516,50	62.019.988.516,50	(215.000.000,00)	(0,35)			
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.930.812.842,30	81.230.312.842,30	299.500.000,00	0,37			
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	7.302.316.000,00	7.302.316.000,00	0,00	0,00			

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PERBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.063.487.000,00	9.813.487.000,00	(250.000.000,00)	(2,48)				
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/pelatihan	5.957.610.000,00	5.957.610.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	3.605.877.000,00	3.355.877.000,00	(250.000.000,00)	(6,93)				
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.969.766.500,00	13.371.800.400,00	(6.597.966.100,00)	(33,04)				
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.878.601.500,00	3.878.601.500,00	0,00	0,00				
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.765.400.000,00	7.167.433.900,00	(6.597.966.100,00)	(47,93)				
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.003.765.000,00	2.003.765.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.20.08	Belanja Jasa Pemasangan dan Instalasi Infrastruktur	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	54.306.223.300,00	54.306.223.300,00	0,00	0,00				
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	6.585.423.300,00	6.585.423.300,00	0,00	0,00				
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41.560.100.000,00	41.560.100.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.313.000.000,00	2.313.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Jasa Lainnya	3.847.700.000,00	3.847.700.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga	109.242.631.300,00	109.242.631.300,00	0,00	0,00				
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	15.039.456.300,00	15.039.456.300,00	0,00	0,00				
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	94.203.175.000,00	94.203.175.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.26	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga	986.756.250,00	986.756.250,00	0,00	0,00				
5.2.2.26.01	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/pihak Ketiga	986.756.250,00	986.756.250,00	0,00	0,00				
5.2.2.27	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.967.835.000,00	20.982.835.000,00	15.000.000,00	0,07				
5.2.2.27.01	Belanja Transportasi	9.043.835.000,00	9.043.835.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.27.02	Belanja Akomodasi	7.457.200.000,00	7.472.200.000,00	15.000.000,00	0,20				
5.2.2.27.03	Belanja Uang Saku Peserta	4.466.800.000,00	4.466.800.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.28	Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	468.760.000,00	468.760.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.28.05	Belanja Pengadaan Alat Kantor dibawah Kapitalisasi	355.430.000,00	355.430.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.28.06	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga dibawah Kapitalisasi	107.330.000,00	107.330.000,00	0,00	0,00				
5.2.2.28.07	Belanja Pengadaan Alat Komputer dibawah Kapitalisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.2.29	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.319.524.000,00	1.319.524.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.29.02	Belanja Beasiswa S1	1.319.524.000,00	1.319.524.000,00	0,00	0,00			
5.2.2.30	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	95.668.457.521,00	0,00	0,00			
5.2.2.30.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	95.668.457.521,00	0,00	0,00			
5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.235.020.000,00	41.742.903.500,00	25.507.883.500,00	157,12			
5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.235.020.000,00	41.742.903.500,00	25.507.883.500,00	157,12			
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	951.352.690.355,28	961.650.372.955,28	10.297.682.600,00	1,08			
5.2.3.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	2.761.700.000,00	2.761.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.07.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau	2.761.700.000,00	2.761.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	59.312.250.000,00	59.312.250.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	2.377.500.000,00	2.377.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	56.134.750.000,00	56.134.750.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.16	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu Generating Set	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.16.04	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Electric Darat Bermotor	20.481.000.000,00	20.481.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.17	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.289.000.000,00	9.289.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.17.01	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.059.600.000,00	6.059.600.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.17.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.17.03	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.972.400.000,00	2.972.400.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.17.04	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.17.05	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.19	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.19.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.19.03	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus							



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman/Alat Penyiripan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyiripan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.450.673.000,00	5.450.673.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	93.080.000,00	93.080.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	575.600.000,00	575.600.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.640.493.000,00	4.640.493.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.240.566.000,00	3.240.566.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.006.700.000,00	1.006.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	203.600.000,00	203.600.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	784.500.000,00	784.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	750.640.000,00	750.640.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	229.126.000,00	229.126.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.088.089.700,00	12.088.089.700,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	6.282.000.000,00	6.282.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.151.250.000,00	3.151.250.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	88.689.700,00	88.689.700,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	264.500.000,00	264.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	496.300.000,00	496.300.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.805.350.000,00	1.805.350.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	508.550.000,00	508.550.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	151.700.000,00	151.700.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Asip Pejabat	150.350.000,00	150.350.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.665.018.000,00	1.665.018.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	999.018.000,00	999.018.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.33.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	55.713.192.000,00	55.713.192.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	54.484.192.000,00	54.484.192.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	15.840.504.158,00	15.840.504.158,00	0,00				
5.2.3.37.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	0,00	422.475.550,00	422.475.550,00	0,00				
5.2.3.37.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	0,00	15.418.028.608,00	15.418.028.608,00	0,00				
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Penserjataan Non Senjata Api	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.45.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Kemanaan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perlindungan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00				
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	490.974.330.586,00	481.731.792.528,00	(9.242.538.058,00)	(1,88)				




NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	451.105.410.586,00	451.105.410.586,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	6.099.500.000,00	6.099.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	14.344.000.000,00	16.077.439.442,00	1.733.439.442,00	12,08			
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.000.000.000,00	2.024.022.500,00	(10.975.977.500,00)	(84,43)			
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.690.420.000,00	5.690.420.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.012.500.000,00	20.012.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	20.012.500.000,00	20.012.500.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Tikik Kontrol/Pasti	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	3.104.750.000,00	3.104.750.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lali Lintas Darat	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	2.154.750.000,00	2.154.750.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	124.869.470.000,00	124.869.470.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.59.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	124.869.470.000,00	124.869.470.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	33.455.261.000,00	33.455.261.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.60.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi	29.955.261.000,00	29.955.261.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESEERAN	SETELAH PERGESEERAN	5 = 4 - 3	6				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
5. 2. 3. 60. 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air-Irigasi	35.878.749.649,08	35.878.749.649,08	0,00	0,00				
5. 2. 3. 61. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	29.753.513.362,80	29.753.513.362,80	0,00	0,00				
5. 2. 3. 61. 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	6.125.236.286,28	6.125.236.286,28	0,00	0,00				
5. 2. 3. 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penguangulangan Be	33.311.775.420,20	33.364.775.420,20	53.000.000,00	0,16				
5. 2. 3. 64. 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	19.591.294.350,20	19.591.294.350,20	0,00	0,00				
5. 2. 3. 64. 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	9.460.906.070,00	9.460.906.070,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 64. 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	4.259.575.000,00	4.312.575.000,00	53.000.000,00	1,24				
5. 2. 3. 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.064.660.000,00	3.064.660.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 66. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	3.064.660.000,00	3.064.660.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Murni/Air Bersih	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 69. 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 73. 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	3.660.263.000,00	0,00	(3.660.263.000,00)	(100,00)				
5. 2. 3. 73. 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	3.660.263.000,00	3.660.263.000,00	0,00				
5. 2. 3. 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	430.800.000,00	430.800.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 82. 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	397.300.000,00	397.300.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 82. 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 82. 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 83. 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00				


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.243.490.000,00	10.699.354.500,00	2.455.864.500,00	29,79			
5.2.3.90.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.243.490.000,00	10.699.354.500,00	2.455.864.500,00	29,79			
5.2.3.91	Belanja Modal Aset lainnya - Software	6.113.208.000,00	6.113.208.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.91.01	Belanja Modal Aset lainnya - Software	6.113.208.000,00	6.113.208.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.92	Belanja Modal Aset lainnya - Master Plan	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset lainnya - Master Plan	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.93	Belanja Modal Aset lainnya - DED	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.93.01	Belanja Modal Aset lainnya - DED	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.95	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.95.01	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.3.96	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	1.190.852.000,00	1.190.852.000,00	0,00			
5.2.3.96.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	1.190.852.000,00	1.190.852.000,00	0,00			
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(647.179.906.623,68)</b>	<b>(647.179.906.623,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00			
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6				
1									
5. 2. 3. 32. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 33. 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	55.713.192.000,00	55.713.192.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 34. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Urum	54.484.192.000,00	54.484.192.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 34. 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 34. 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 36. 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 36. 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	15.840.504.158,00	15.840.504.158,00	0,00				
5. 2. 3. 37. 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	0,00	422.475.550,00	422.475.550,00	0,00				
5. 2. 3. 37. 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	0,00	15.418.028.608,00	15.418.028.608,00	0,00				
5. 2. 3. 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 39. 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 45. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	240.894.000,00	240.894.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 48. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanaan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 48. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00				
5. 2. 3. 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	490.974.330.586,00	481.731.792.528,00	(9.242.538.058,00)	(1,88)				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1								
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00	0,00		
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00	0,00		
6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	340.679.906.623,68	340.679.906.623,68	0,00	0,00	0,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	0,00	0,00	0,00		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DRS. H. BAORUN, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	DRS. ZAINUDDIN HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	DYDRO ISUDRO, S.H., M.H	Pt. Kepala Biro Hukum	
4	DRS. PURNOMO, MM	Pt. Kepala BERKAD	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBERIE